

FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)

Isye Regina Altje Manoppo¹

Michael Mantiri²

Sarah Sambiran³

Abstrak

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buisse. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buisse belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buisse, tidak hanya dapat membantumeningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buisse. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buisse sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.

Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan adalah merupakan langkah untuk mencapai masyarakat sejahtera, salah satunya sejahtera dari segi ekonomi. Maka dari itu pemerintah dituntut agar lebih memperhatikan hal-hal ini, salah satunya adalah fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pembangunan ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian masyarakat desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam sebuah organisasi setiap atasan atau pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, komunikasi yang baik dan pembagian kerja kepada para bawahan oleh atasan, maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi maka setiap pekerjaan yang dilakukan tidak dapat tercapai dengan baik.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya

untuk menyalurkan dan menyatupadukan aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan dan pelaksanaan. Jadi dalam hal ini koordinasi juga merupakan keseluruhan proses manajemen pembangunan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Agar pembangunan berjalan dengan baik, pemerintah desa harus bisa mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Pemilihan strategi ini sangat penting karna menentukan koordinasi dari pemerintah desa itu sendiri agar mampu berperan secara efektif dan efisien. Fungsi koordinasi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan seringkali belum secara optimal dapat diwujudkan di desa Buise. Pentingnya koordinasi secara optimal oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Buise ini dapat di dukung secara penuh. Fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi ialah jika berbicara tentang organisasi berarti berbicara tentang sebuah kelompok, dimana kelompok tersebut biasanya memiliki atasan dan juga bawahan, dimana bawahan berada dibawah pengarah atasan demi mencapai tujuan bersama.

Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan organisasi, karna itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan,

diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karna tanpa adanya koordinasi, tugas dan pekerjaan dari setiap anggota tidak dapat berhasil. Koordinasi merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh atasan maupun setiap anggota organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menelaraskan menghubungkan kegiatan orang-orang, kelompok atau satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi lancar, tertib, teratur dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai suatu lembaga pemerintah yang berada di desa, tentunya pemerintah desa bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Maka pelaksanaan pembangunan desa sangat diperlukan dalam menunjang pelayanan tersebut juga dibutuhkan koordinasi yang baik antar pemerintah desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurangnya koordinasi dari pemerintah desa mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa Buise ini belum dapat terlaksana secara optimal. Sebagaimana yang diketahui bahwa koordinasi merupakan upaya mengarahkan, dan menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok atau satuan kerja dalam suatu organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan

menjadi lancar. Secara umum terlihat bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan belum terwujud secara menyeluruh. Sesuai pengamatan peneliti masih ditemui adanya keluhan masyarakat bahwa pembangunan yang ada di desa Buise masih belum memenuhi harapan masyarakat desa ditandai dengan belum terpenuhinya fasilitas umum. Contohnya pembangunan fisik yang berupa pembangunan jalan stapak ke kebun, dimana pembangunan jalan ke kebun ini merupakan hal yang penting karna mengingat sebagian besar masyarakat desa Buise bermata pencaharian sebagai petani. Maka dari itu harus ada kerja sama yang baik antara Kapitalau, Sekretaris Desa, BPD/MTK, dan Kepala-Kepala Lindongan agar pelaksanaan pembangunan di Desa Buise dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat dan dapat mencapai masyarakat yang sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Istilah koordinasi dalam bahasa Inggris disebut "coordination". Istilah coordination terdiri dari dua kata yaitu "co" yang artinya "bersama", dan "ordination" yang berarti "memerintah". Jadi, coordination berarti memerintah bersama. Secara etimologis istilah coordination berasal dari bahasa Latin yaitu "cum" yang berarti berbeda-beda, dan "ordinare" yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya (Pariata Westra, 2012). Dalam ilmu administrasi atau manajemen, koordinasi merupakan salah satu fungsi administrasi/manajemen. Henry Fayol, Luther Gullick dan beberapa ahli ilmu administrasi/manajemen lainnya memasukkan fungsi koordinasi atau

pengkoordinasian ini sebagai salah satu fungsi organik/penting dari administrasi atau manajemen. Fungsi-fungsi administrasi/manajemen menurut Fayol yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian komando), *coordinating* (pengkoordinasian), dan *controlling* (pengawasan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan ataupun simpang siur. S.P Hasibuan (2016:85) mendefinisikan Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Syafiee (2015:88) mendefinisikan Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk mempercepat proses pencapaian tujuan. Koordinasi diperlukan pada semua tingkat kegiatan organisasi. Baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan sejak awal dimasukkan ke dalam rencana atau program yang disusun. Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota koordinasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri agar anggota

atau satuan organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan bawahan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Menurut Inu Kencana (2009:3) dalam bukunya yang berjudul kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, secara etimologi pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang mempunyai awalan "pe" yaitu "pemerintah" dan akhiran "an" yaitu "pemerintahan", dalam kata dasar perintah yang paling sedikit ada

empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yang adalah sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertical maupun horizontal.

Selanjutnya, menurut R. Mac Iver dalam Inu Kencana (2009:6), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang bagaimana manusia itu bias diperintah. Sumendar dalam inu Kencana (2009:6), pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran seluruh lapisan masyarakat serta keberadaan legitimasi. Pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan demokratis dalam hal ini adalah tingkat desa, yaitu pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat, selain itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat (Ali Madekhan, 2007:103).

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin yang merupakan suatu gerakan untuk kemajuan dalam mewujudkan masyarakat pancasila. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, pembangunan merupakan konsep normative yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Siagian (2008:85) mengatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ginanjar Moejiarto (2007:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik mencapai upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, dijelaskan oleh Bintoro Tjokromidjojo, bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan keridohan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya itu dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Theresia,dkk (2015:1): upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”. Pembangunan juga disebut sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti dalam

rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus mengalami perubahan. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segera kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut (Mardikanto, 2009).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian konektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. (Meleong, 2004) Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain).

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian

(Arikunto, 2008:128) cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut adalah menggunakan "purposive sampling" atau sampling

bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut di atas maka informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa (1 orang)
2. Sekretaris Desa (1 orang)
3. BPD/MTK (1 orang)
4. Masyarakat yang ada di desa Buise (7 orang)
5. Kaur Pembangunan (1 orang)
6. Kaur Pemerintahan (1 orang)
7. Kaur Umum (1 orang)
8. Tokoh Agama (1 orang)

Selanjutnya agar dapat memperoleh informasi secara mendalam dan lebih lengkap dari informan tersebut maka dipergunakan teknik snowball sampling. Yang menjadi focus penelitian adalah koordinasi-koordinasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Buise, Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Hasil Penelitian

Fungsi koordinasi merupakan hubungan beberapa variabel yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Karena itu, fungsi koordinasi menunjukkan kedudukan seseorang dalam menjalankan tugas dan perannya. Koordinasi pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pembangunan desa tidak akan terlaksana tanpa adanya koordinasi yang baik dan terarah dari para pemerintah desa. Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak terlepas dari

adanya koordinasi yang baik, antara para pemerintah desa maupun antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Baik sebagai kesatuan sistem maupun kesatuan individu yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena secara prinsip pembangunan itu sendiri ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka dari itu, terlaksana dan tepat sasaran pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara sesama pemerintah desa. Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan memberi intruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau bahkan nasihat.

Berbicara tentang koordinasi pemerintah desa, tentunya akan dihadapkan pada teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan yang mampu untuk memahami kesalahan yang telah terjadi, menepis salah pengertian serta ketidakjelasan komunikasi antar sesama pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Seperti halnya di desa Buise, koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yaitu seperti :

- a. Membangun jalan alternatif pantai sepanjang 197 Meter
- b. Melakukan koordinasi untuk pembangunan jalan stapak ke kebun

- c. Melakukan koordinasi untuk memperbaiki drainase yang rusak
- d. Membuat tanggul pemecah ombak

Salah satu hal yang penting, dalam lingkup pemerintah desa adalah tentang masalah koordinasi pemerintah desa itu sendiri agar dapat melaksanakan pembangunan demi mencapai masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi.

Untuk pembangunan fisik, khususnya pembangunan fisik berupa pembangunan jalan stapak ke kebun merupakan hal yang harus diupayakan dari pemerintah desa mengingat ada sebagian besar masyarakat desa Buise bekerja sebagai petani, karena apabila terjadi musim hujan sangat sulit bagi masyarakat desa Buise untuk dapat pergi ke kebun.

Mengenai koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Buise perlu mendapat perhatian yang lebih karena dari upaya peningkatan pembangunan fisik tersebut dapat memberikan dampak positif bagi desa untuk bisa lebih berkembang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan yang akan dilaksanakan di desa sangat ditentukan oleh koordinasi antara pemerintah desa Buise dan kiranya Kapitalau (Kepala Desa) dan Ketua MTK (Majelis Tua-tua Kampung) segera dapat memecahkan konflik yang terjadi di antara mereka demi kepentingan banyak orang dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat desa yang sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti, pemerintah desa Buise sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan, namun pemerintah desa yang lain berharap agar permasalahan yang terjadi antara Kepala Desa dengan Ketua MTK tidak berlarut-larut dan

menemukan titik temu agar pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena ada koordinasi yang baik pula. Pemerintah Desa tetap berharap agar masyarakat pun mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bersama. Masyarakat desa Buise sendiri, berdasarkan hasil observasi mempunyai keinginan yang sama dengan pemerintah. Masyarakat merasa senang dengan program yang dilakukan pemerintah desa yang menyatakan bahwa : Masyarakat desa ibu Widya Zachawerus “Kami merasa senang dengan adanya pembangunan jalan stapak ke kebun walaupun baru di bangun di lindongan III Desa Buise namun hal tersebut dapat membantu kami sebagai istri yang suaminya bekerja di bidang pertanian karena memudahkan kami untuk mengantar makanan ataupun untuk ikut secara bersama-sama ke kebun”.

Aspek-aspek pembangunan telah mengalami perubahan sejak komunikasi pembangunan mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1970-an baik dalam organisasi strategi penanggulangan kemiskinan maupun penggunaan media komunikasi. Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses perencanaan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehinggadapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat. Koordinasi dalam perencanaan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan,

kontinuitas perencanaan dimulai sejak prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dalam tindakan seseorang dalam suatu organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Maka dari itu, sebelum melakukan tindakan harus terlebih dahulu mempertimbangkan efek yang akan terjadi pada orang lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa atau yang disebut dengan nama lain harus juga melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini mencakup dengan pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar masyarakat yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pemimpin memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan yang lebih baik.

Kesimpulan

1. Koordinasi antara Kapitalau (Kepala Desa) dengan Ketua MTK, masih mengalami kendala dimana keduanya terlibat konflik sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Buise.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa juga menjalin koordinasi yang baik dengan masyarakatnya, walaupun masih ada masyarakat desa yang belum

sepenuhnya memahami tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa .

3. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi dari seluruh masyarakat bisa dikatakan antusias. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat sudah cukup aktif, baik dalam partisipasi secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perencanaan pembangunan selalu dimusyawarakan terlebih dahulu sehingga keberhasilan pembangunan selalu berkelanjutan dengan arah dan tujuan yang diinginkan bersama.

Saran

1. Mencari jalan keluar dan titik temu serta mengundang Tokoh agama dan beberapa masyarakat untuk melakukan mediasi dalam permasalahan yang terjadi antara Kepala Desa dan Ketua MTK agar proses pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, langkah baiknya lebih meningkatkan komunikasi yang sudah terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan bersama
3. Mempertahankan setiap keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi agar masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun
4. Perencanaan yang dilakukan harus lebih transparan, agar masyarakat menjadi lebih tau tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan fisik.
5. Kapitalau (Kepala Desa) harus menghimbau semua pemerintah desa serta masyarakat tanpa terkecuali,

jangan membedakan antara masyarakat yang memilih atau tidak sewaktu pemilihan kepala desa berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, H Malayu S.P 2016. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kencana, Syafie Inu 2015. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Theresia,dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : CV Alfabeta.
- Stoner L.J. dan Charles Wankel, 2006, Manajemen. Jakarta : terjemahan, Intermedia.
- Meleong Lexy, J.2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:
- Arikunto, 2008, Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rineke Cipta.
- Paton, Adri. 2005, Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah. Malang : Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
- Madekhan Ali, 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan. Malang : Averros Press.
- Djamin Awaluddin dalam Hasibuan, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : PT Bumi Askara.
- Brech E.F.L dalam Hasibuan, 2016. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Moejiarto Ginanjar, 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- G. R. Terry dalam Inu Kencana Syafie, 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kencana Syafie Inu, 2009. Kepemimpinan Pemerintahan

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 2 No. 2 Tahun 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Indonesia. Cetakan ketiga.
Bandung : PT Refika Aditama.
- White D Leonard dalam Siagian,
Sondang P. 2008. Administrasi
Pembangunan. Jakarta : PT Bumi
Askara.
- Iver Mac R dalam Inu Kencana dalam
Inu Kencana, 2009. Kepemimpinan
Pemerintahan Indonesia, Cetakan
ketiga. Bandung : PT Refika.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian
Kombinasi. Bandung : CV
Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian
Bisnis. Jakarta : CV Alfabeta.